

Gus Dur: Muslim Humanis, Pejuang Demokrasi

Achmad Ubaidillah
Direktur, Pusat Studi Pesantren
Bogor, INDONESIA

KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur memang bukanlah sosok pemimpin biasa. Ia merupakan – meminjam istilah sosiolog Max Weber – pemimpin kultural yang kharismatik. Daya tarik Gus Dur sebagai manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan, memang tidak mudah pudar bahkan hingga saat upacara pemakaman beliau yang menarik perhatian yang sangat luas dari beragam kalangan masyarakat. Mereka tetap menghormati dan mengakui kiprah, ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur semasa hidupnya.

Layaknya sebuah teks yang memiliki multi tafsir, banyak hal yang dapat diketengahkan terkait kiprah dan perjuangan Gus Dur dalam beragam dimensi peran untuk Indonesia yang sangat dicintainya. Dalam istilah yang berbeda, Majalah *Editor*, tahun 1990-an pernah memuat judul, *Mozaik Bernama Abdurrahman Wahid* untuk menggambarkan ketokohan Gus Dur. Namun demikian, obyektifitas Gus Dur setidaknya dapat diketahui melalui sikap dan cara pandangnya yang dikaji para akademisi dan peneliti dengan menggunakan metodologi dan pendekatan komprehensif.

Banyak kalangan yang menilai dan mengenang Gus Dur sebagai muslim nasionalis, pejuang demokrasi sekaligus negarawan sejati. Pemberian gelar ini tidak terlepas dari kiprahnya sebagai sosok kreatif yang begitu gigih menyampaikan visi serta berbagai gagasan dan pokok pikiran tentang keislaman, kebangsaan dan demokrasi secara utuh kepada masyarakat di Indonesia. Konsistensi perjuangan ini pula yang kemudian mendorong banyak institusi di mancanegara untuk memberikan beragam *award* kepada Gus Dur atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dialog lintas agama dan perdamaian umat manusia.

Gus Dur merupakan paduan antara pemikir dan aktivis. Sebagai pemikir, Gus Dur terlibat secara sangat intensif dalam pergumulan pemikiran Islam berbagai mazhab dan beragam aliran. Basis pemikiran keislaman Gus Dur berakar pada tradisi keilmuan klasik yang sangat kuat, dengan kombinasi wawasan dan khazanah pemikiran modern yang sangat kaya. Sebagai aktivis, Gus Dur sudah sejak lama terlibat dalam perjuangan demokrasi di Tanah Air. Ia merupakan satu dari sedikit tokoh nasional yang begitu gigih mendorong proses demokratisasi dari bawah (baca: *akar-rumput*). Sumbangan terpenting Gus Dur adalah kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di lapisan bawah melalui berbagai instrumen sosial, terutama lembaga pendidikan (pesantren) dan lembaga sosial ekonomi.

Gus Dur menggunakan pendekatan *cultural politics* dalam meretas jalan demokrasi, yang bertumpu pada penguatan lembaga-lembaga sosial non-negara yang ada di masyarakat (Amich Alhumami, 2001). Perjuangan yang dilakukan Gus Dur dalam menanamkan demokrasi selama ini diantaranya mengandung unsur-unsur pengakuan hak-hak dasar warga negara dan pengakuan pluralisme yang ada di Indonesia (Suyoto, 2009).

Pengakuan pluralisme di Indonesia ini tentunya sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai motto bangsa Indonesia yang memberikan tempat terhormat terhadap keanekaragaman yang merupakan fenomena khas Indonesia.

Gus Dur, sebagaimana Nurcholish Madjid, merupakan sosok Muslim yang sampai akhir hayatnya memperjuangkan HAM, demokrasi dan pluralisme dalam ranah publik untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Toleransi, inklusivisme, dan non-sektarianisme merupakan visi besar sekaligus obsesi yang senantiasa diperjuangkan dalam upaya pembelaan terhadap kemanusiaan serta perlindungannya terhadap kelompok minoritas. Itulah yang diperlukan Indonesia pasca otoritarianisme Orde Baru.

Pembelaan dan perlindungan tersebut sungguh merupakan cerminan komitmen Gus Dur yang tegas menyatakan bahwa komitmen kepada diri kita sebagai manusia dan kemanusiaan itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah anak dari sebuah bangsa, bersama sama menciptakan kehidupan di muka bumi dalam lingkup negara kita. Sebuah negara Pancasila artinya bukan negara agama (Achmad Ubaidillah, 2009).

Komitmen ini secara jelas memperlihatkan visi besar lain dari sosok Gus Dur yakni visi kebangsaannya sebagai tokoh NU yang pernah memelopori perlunya sikap tentang hidup bernegara yang harus diambil NU. Itu secara jelas diproklamasikan di tahun 1984. Di situ dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan dengan Pancasila sebagai dasarnya, merupakan bentuk yang final bagi NU. Apakah pernyataan final itu cerminan keinginan jamaah NU, atau cerminan situasi ketika NU tidak bisa berkata lain, tentu akan diuji sendiri oleh sejarah (Rumadi, 2006). Tetapi yang jelas sikap ini merupakan respon atas polemik mengenai perlu atau tidaknya Islam dijadikan sebagai dasar negara khususnya yang berkembang di internal NU.

Mengenai hal tersebut, Moqsith Ghazali (2006) menyatakan bahwa Gus Dur berulang kali menyatakan visi kebangsaannya yang beliau tuangkan dalam ungkapan bahwa tidak ada ajaran Islam yang mengharuskan untuk menegakkan negara Islam. Gus Dur juga seringkali mengatakan bahwa yang ia perjuangkan adalah Islam berwatak kultural, bukan Islam yang selalu ingin tampil di kelembagaan politik.

Sebagai pemikir Islam terpadang, Gus Dur memang seringkali menyuarakan pentingnya menjadikan Islam sebagai landasan etik dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ideal Islam seperti keadilan, egalitarian, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan pada pluralisme harus menjiwai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi pemikir Islam seperti Gus Dur, perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat, menuntut umat Islam untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif sebagai respons terhadap fenomena kehidupan modern. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, Islam tak perlu ditampilkan secara formal sebagai agama negara. Sebagai bangsa majemuk, umat Islam harus lebih mengutamakan penegakan keadilan, pembangunan demokrasi, dan pengembangan watak inklusivisme (Amich Alhumami, 2001).

Jika umat Islam mampu merealisasikan ide-ide besar tersebut – sebagaimana cita-cita luhur Gus Dur – maka hal itu merupakan sumbangan terpenting bagi ikhtiar mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat di mata dunia luar sekaligus menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam itu kompatibel dengan kemodernan, demokratis, dan terbuka. Sehingga Indonesia menjadi alternatif rujukan

bagi pandangan masyarakat Barat tentang wajah Islam yang moderat seperti di Indonesia.

Selamat jalan wahai Guru bangsa, sang pejuang demokrasi. Engkau memang telah wafat tetapi semoga komitmen, keberanian, keilmuan, keteladan dan semangat luhurmu untuk mewujudkan cita-cita luhur Islam akan tetap hidup di sanubari bangsa Indonesia serta melanjutkan perjuanganmu untuk Indonesia. *Wallahualam.*